

TMMD Bangun Desa, Pemerintah Bombana Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang.

“Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Satpol PP Bombana Perketat Pengawasan Hiburan Malam dan Takjil Jelang Ramadan

Bombana, Sultranet.com - Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, pedagang takjil, warung makan, dan titik keramaian lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran ibadah puasa masyarakat Muslim. Pengawasan intensif mulai diberlakukan sejak awal pekan ini. *Rabu, 14 Mei 2025.*

Kepala Satpol PP Bombana, Rusman, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban, khususnya di area publik yang berpotensi menimbulkan gangguan selama Ramadan.

“Menjelang Ramadan ini, kami akan melakukan patroli malam di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menertibkan pedagang takjil yang berjualan di depan Masjid Raya. Tujuannya agar kegiatan jual beli tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah,” ujar Rusman saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata penindakan, tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan selama bulan puasa.

“Selain penertiban, kami juga mengedukasi masyarakat, terutama para pedagang, agar tetap menghormati bulan suci ini. Kami ingin suasana Ramadan di Bombana berjalan damai, penuh toleransi, dan memberi kenyamanan untuk semua,” lanjutnya.

Satpol PP juga akan menyoal tempat hiburan malam dan pijat tradisional. Rusman menyebut bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada pengelola tempat hiburan. Dalam edaran tersebut, akan diatur batasan operasional selama Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan malam agar kegiatan mereka tidak mengganggu masyarakat yang beribadah. Untuk tempat pijat tradisional, akan dilarang beroperasi selama Ramadan. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dihormati,” kata Rusman menegaskan.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Satpol PP Bombana juga akan menyebar petugas ke wilayah-wilayah kecamatan guna memastikan seluruh titik di daerah tetap dalam kondisi aman dan tertib.

“Kami turunkan anggota ke seluruh wilayah, tidak hanya di ibukota. Semua titik akan kami pantau. Kalau ada pelanggaran ringan, kami beri teguran. Tapi kalau sudah masuk kategori berat, bisa saja kami lakukan penutupan usaha,” jelasnya.

Pengawasan terhadap rumah makan juga menjadi perhatian khusus. Menurut Rusman, pemerintah akan tetap memberikan ruang toleransi bagi rumah makan yang buka di siang hari, terutama yang menyasar konsumen non-Muslim, tetapi tetap harus mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

“Rumah makan boleh buka, tapi harus menyesuaikan. Ada mekanisme dan etika yang harus dipatuhi. Ini penting agar tidak memicu gesekan sosial. Pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan, terutama pada jam-jam rawan saat berbuka puasa di kawasan ramai.

Rusman juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban bersama, terutama di momen penuh berkah ini. Ia berharap semangat toleransi dan persaudaraan tetap menjadi nafas masyarakat Bombana.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjalankan puasa dan yang tidak berpuasa agar saling menghargai. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus ikut menjaga agar suasana Ramadan benar-benar terasa damai dan penuh makna,” tutup Rusman.

Pemkab Bombana Dukung Swasembada Pangan Lewat Panen Raya Jagung di Lantari Jaya

Bombana, Sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), dr. H. Sunandar, M.M.Kes, dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Rabu (14/5/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Polres Bombana ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan berbasis kemitraan dengan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kerja sama yang sinergis antara aparat kepolisian dan para petani dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sunandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polres Bombana yang turut aktif mendukung pembangunan sektor pertanian di luar tugas utamanya dalam menjaga keamanan.

“Pada kesempatan ini, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah membimbing dan membina kelompok tani hingga kita dapat melaksanakan panen raya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Sunandar.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pembinaan terhadap petani, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian.

Panen raya ini merupakan puncak dari program penanaman jagung hasil kolaborasi antara Polres Bombana dan kelompok tani binaan. Program tersebut telah melalui proses pendampingan sejak masa tanam hingga masa panen. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Lantari Jaya, kepala desa, para penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Lomba Kasih.

Suasana panen berlangsung semarak dan penuh antusias. Kegiatan panen dilakukan secara simbolis oleh Pj. Sekda Bombana dan Kapolres Bombana bersama sejumlah petani. Momen tersebut menjadi gambaran kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, mengatakan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam membantu masyarakat, terutama di sektor pertanian. "Kami ingin menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka," ucap Wisnu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi model kerja sama antara institusi dan masyarakat di bidang lain, utamanya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Masyarakat dan petani Desa Lomba Kasih mengaku senang dengan hasil panen jagung yang memuaskan. Mereka merasa diperhatikan dan didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun Polres Bombana, yang terlibat langsung sejak proses awal penanaman.

"Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Kami berharap program ini terus berlanjut agar petani di desa kami semakin semangat," ujar salah seorang petani yang ikut hadir dalam panen raya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menggerakkan petani dan masyarakat Bombana untuk lebih giat dalam mengelola sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus mengawal program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sebagai bentuk nyata dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Bupati Bombana Terima PJS Awards 2025 di Jakarta

Jakarta, Sultranet.com - Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam seremoni resmi yang digelar di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa malam, 13 Mei 2025, ia dianugerahi penghargaan bergengsi dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui ajang *PJS Awards 2025*.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Burhanuddin dalam menjaga kemerdekaan pers serta mendukung penuh kegiatan-kegiatan organisasi PJS, baik di tingkat daerah maupun nasional.

PJS Awards merupakan agenda tahunan yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan pengembangan media yang independen. Para penerima dipilih secara selektif oleh tim juri yang menilai kontribusi nyata tokoh-tokoh tersebut terhadap pembangunan demokrasi dan keterbukaan publik di wilayah masing-masing.

Dalam acara tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana. Kehadiran pasangan ini menjadi simbol kolaborasi dan dukungan penuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditemui usai menerima penghargaan, Burhanuddin mengaku bersyukur sekaligus terhormat atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya pribadi, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Bombana serta insan pers yang terus bekerja menjaga marwah jurnalistik.

“Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab moral bagi saya pribadi dan juga Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membuka ruang

kolaborasi yang sehat dengan media. Kami percaya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Dan itu hanya bisa terjadi jika pers kita sehat, bebas, dan bertanggung jawab,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan dan insan pers dari berbagai daerah.

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang kritis, berpengetahuan, dan berdaya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memosisikan diri sebagai pihak yang membatasi kebebasan pers, tetapi sebaliknya, menjadi mitra yang mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan etis.

“Kami menyadari betul, tanpa dukungan media yang independen, pembangunan daerah tidak akan maksimal. Pers adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus kontrol sosial yang penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan rakyat,” lanjutnya.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan dedikasinya atas penghargaan ini kepada seluruh warga Bombana yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan membangun ekosistem demokrasi di daerah tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat dan insan pers.

Sementara itu, Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, dalam keterangannya menyebut Bupati Bombana sebagai salah satu kepala daerah yang secara konsisten menjalin kemitraan yang sehat dan transparan dengan media. Ia menilai, sikap terbuka dan dukungan nyata terhadap kemerdekaan pers menjadi indikator penting dalam menentukan penerima penghargaan tahun ini.

“Pak Burhanuddin adalah contoh kepala daerah yang memahami peran strategis media dalam pembangunan. Ia tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara kebijakan, dalam menciptakan ruang kebebasan pers di daerahnya,” ujar Mahmud.

Penghargaan ini juga menjadi catatan positif dalam perjalanan kepemimpinan Burhanuddin yang selama ini dikenal inklusif dan terbuka terhadap kritik. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Bombana perlahan menjelma menjadi salah satu daerah yang ramah terhadap jurnalisme bebas dan berintegritas, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kehadiran Bupati Bombana dalam ajang nasional ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Bombana di mata publik, khususnya dalam hal membangun sinergi antara pemerintah dan media. Dengan penghargaan ini, Burhanuddin berharap semakin banyak daerah yang berani membuka diri dan menjadikan pers sebagai mitra pembangunan, bukan lawan kritik.

“Ini bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutup Burhanuddin.

WKRI Sultra Gelar Konferda V, Pemprov Dorong Perempuan Katolik Perkuat Peran Sosial

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran organisasi perempuan Katolik dalam pembangunan sosial di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, Iwan Susanto, mewakili Gubernur Sultra, saat menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) V Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD Sultra, Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Zenith Kendari.

Kegiatan lima tahunan yang digelar WKRI Sultra ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi internal dan refleksi perjalanan organisasi yang telah berusia seabad lebih. Tema yang diangkat, “Peran Wanita Katolik RI pada Usia Seabad dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dan Kesadaran Ekologis,” dinilai sejalan dengan nilai-nilai pelayanan dan penguatan peran perempuan di ruang publik.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Konferda ini sebagai forum strategis memperkuat eksistensi organisasi masyarakat sipil, khususnya WKRI, di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi,” kata Iwan saat membacakan sambutan

Gubernur.

Menurutnya, setidaknya ada tiga pesan moral dari tema Konferda kali ini. "Pertama, refleksi dan evaluasi perjalanan organisasi selama lebih dari seabad. Kedua, pengembangan program yang berdampak bagi masyarakat. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas organisasi agar program-program yang dijalankan lebih efektif," ujar Iwan.

Ia juga menekankan agar WKRI terus menjadi pelopor dalam membumikan nilai-nilai cinta kasih di tengah kehidupan sosial, serta aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Konferda V WKRI Sultra turut dihadiri Ketua Presidium DPP WKRI, Lusia Willar, Penasehat Rohani WKRI DPD Sultra Pastor Leonardo Kelvin Tandiyu, Ketua Presidium WKRI DPD Sultra Rita Pirade, Ketua Barisan Ansor Sultra, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra atau yang mewakili, serta para sesepuh dan anggota WKRI dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya saat membuka acara secara resmi, Lusia Willar menegaskan pentingnya Konferda sebagai forum evaluasi dan penetapan arah gerak organisasi ke depan. "Ini bukan hanya seremoni lima tahunan, tapi momentum memperkuat semangat pelayanan yang menjadi roh dari WKRI," kata Lusia.

Ia juga menyoroti peran WKRI dalam menjaga keberagaman, menangkal radikalisme, serta membangun solidaritas sosial berbasis cinta kasih dan nilai-nilai demokrasi. "WKRI harus menjadi pelita yang membawa harapan, memperkuat jejaring lintas agama dan budaya, serta merangkul generasi muda, terutama remaja putri, agar aktif dalam organisasi," ujarnya.

Saat ini, WKRI tercatat memiliki 37 DPD, 783 DPC, dan lebih dari 105 ribu anggota di seluruh Indonesia. Dengan jaringan luas tersebut, WKRI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Sultra, Rita Pirade, menyampaikan bahwa Konferda kali ini akan melahirkan kepengurusan baru serta merumuskan berbagai kebijakan yang berdampak nyata. "Kita berharap hasil Konferda bisa menjadi langkah maju bagi WKRI Sultra dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan," kata Rita.

Ia juga mengajak seluruh anggota WKRI untuk terus menjaga semangat pelayanan, mengembangkan program-program pemberdayaan berbasis komunitas, serta memperkuat kehadiran organisasi di tengah masyarakat.

WKRI sebagai organisasi perempuan Katolik non-partisan, telah berkontribusi selama lebih dari satu abad dalam bidang sosial, pendidikan, advokasi perempuan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Melalui Konferda ini, organisasi tersebut ingin memastikan bahwa warisan nilai pelayanan tetap hidup dan relevan dengan tantangan zaman.

Kegiatan Konferda V WKRI DPD Sultra berlangsung dalam suasana akrab, khidmat, dan penuh semangat persaudaraan. Diharapkan, hasil dari forum ini tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Pepadi Sultra Dikukuhkan, Pemprov Komitmen Jaga Seni Wayang di Tengah Arus Globalisasi

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dalam melestarikan seni budaya wayang sebagai warisan luhur bangsa. Hal ini ditegaskan saat acara pengukuhan Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024-2029 yang digelar di Ballroom Sahid Azizah Syariah Kendari, Sabtu malam, 10 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Adrian Nursalam, hadir mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang berhalangan hadir karena menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakilkan. Dalam sambutannya, Adrian membacakan pesan Gubernur

kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan dedikasi tinggi.

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan seluruh jajaran Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024-2029. Pemerintah Provinsi berharap agar Pepadi semakin aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni pedalangan, di tengah gempuran budaya asing yang mempengaruhi generasi muda,” kata Adrian.

Menurutnya, dalang bukan hanya sekadar seniman, tetapi juga agen transformasi budaya yang mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui media pertunjukan wayang. Ia juga menekankan bahwa agenda pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Pepadi Sultra sebagai organisasi seni budaya.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi, ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Pepadi Pusat, Ragil Radyo, bersama jajaran pengurus pusat.

Dalam sambutannya, Ragil menyebut bahwa seni wayang kini telah menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. “Di Amerika Serikat, gamelan dan wayang bahkan telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah universitas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa UNESCO telah menetapkan wayang sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* sejak 2003. Karena itu, Pepadi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan budaya digital.

“Regenerasi dalang adalah kunci. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan yang kuat di tengah era globalisasi,” ujar Ragil.

Mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pelestarian budaya telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025-2030. Visi pembangunan “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan seni

dan budaya sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter masyarakat.

Gubernur juga mendorong agar Pepadi Sultra menjadi wadah pembinaan bagi calon dalang dari kalangan milenial dan Gen Z. “Wayang bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan. Cerita-ceritanya mengandung nilai moral, sosial, bahkan spiritual yang penting bagi generasi muda,” ucap Adrian.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga seni pedalangan sebagai identitas budaya yang tidak ternilai harganya. Pemprov Sultra, lanjutnya, siap memfasilitasi pagelaran wayang sebagai media sosialisasi program pembangunan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Acara pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK Ketua Umum DPP Pepadi Pusat Nomor 006/SK/DPP-PEPADI/X/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Pepadi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2024-2029. Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan gairah seni pedalangan di Sultra semakin hidup dan mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Pepadi sendiri merupakan organisasi profesi seni pedalangan yang didirikan pada 14 April 1971 oleh Suryono. Pada tahun 1975, Pepadi resmi menjadi organisasi nasional tunggal bagi para dalang di Indonesia.

Melalui semangat kolaboratif antara pemerintah dan komunitas budaya, masa depan wayang di Sulawesi Tenggara diyakini akan tetap terjaga dan terus berkembang. Seni pedalangan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari narasi kebangsaan yang terus relevan hingga masa depan.

Bupati Bombana Kukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna Periode 2025-2028

Bombana, Sultranet.com — Dalam suasana penuh kehangatan dan

kebersamaan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna (KKW) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025-2028. Pengukuhan berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Mei 2025, menjadi momen penting dalam memperkuat jalinan sosial dan budaya masyarakat Wuna yang merantau di Kabupaten Bombana.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Komisi IV Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Bombana, jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Bombana, serta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Bombana.

Bupati Bombana dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai momentum penting untuk membangun sinergi dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Hari ini saya merasa bangga dapat mengukuhkan langsung saudara-saudara saya sebagai pengurus baru Kerukunan Keluarga Wuna Bombana. Saya yakin, di bawah kepemimpinan yang baru ini, KKW akan menjadi motor penggerak persatuan, pelestarian budaya, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana senantiasa membuka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Pemerintah daerah selalu hadir mendukung upaya pelestarian budaya. KKW ini adalah bagian dari kekuatan sosial yang tak ternilai dalam membangun peradaban lokal,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kekeluargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Wuna di Bombana. Menurutnya, organisasi kekerabatan seperti KKW memiliki peran yang strategis dalam menjaga solidaritas dan membangun daerah.

“Solidaritas seperti ini adalah fondasi kuat bangsa. KKW tidak hanya menjaga hubungan kekeluargaan, tapi juga bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Jaelani.

Senada dengan itu, La Ode Umar Bonte yang merupakan anggota DPD RI dan juga putra daerah Wuna, mengajak seluruh pengurus KKW untuk terus menjaga dan merawat budaya di tengah tantangan modernisasi.

“Budaya Wuna adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Organisasi ini punya peran penting dalam merawat nilai-nilai luhur sekaligus menyatukan semangat masyarakat Wuna yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Umar Bonte.

Bupati Muna yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat masyarakat Wuna di Bombana. Ia berharap kebersamaan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarwilayah.

“Kami sangat bangga melihat masyarakat Wuna tetap menjaga budaya dan kebersamaan meski berada di luar kampung halaman. Mari terus jalin sinergi lintas daerah untuk membangun daerah kita bersama,” ungkap Bupati Muna.

Sementara itu, Ketua KKW Bombana terpilih menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjadikan KKW sebagai wadah silaturahmi yang aktif, solid, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kami siap bekerja, melayani, dan menjaga kehormatan organisasi ini. Bersamaan, mari kita jadikan KKW sebagai kekuatan sosial yang aktif membangun dan menjadi mitra pemerintah,” kata Ketua KKW.

Acara pengukuhan ditutup dengan penampilan seni budaya khas Wuna yang memukau para tamu undangan. Momen ramah tamah antarwarga dan tokoh yang hadir turut menambah kehangatan suasana, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Wuna meski berada di tanah rantau.

Kehadiran para tokoh penting dan suasana penuh kekeluargaan dalam acara ini mempertegas bahwa Kerukunan Keluarga Wuna bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama untuk menjaga jati diri, merawat budaya, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Pemerintah dan masyarakat sepakat, sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi modal sosial dalam membangun daerah

yang lebih maju dan berbudaya.

Pemprov Sultra Siap Kawal Keberangkatan 2.018 Jamaah Haji 2025

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M bagi 2.018 jamaah asal Sultra. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Jamaah Haji yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Jumat (9/5), di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, Wakapolda, Danlanal, pimpinan OPD terkait, para kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, perwakilan Imigrasi, otoritas Bandara Haluoleo, serta para bupati dan wali kota atau yang mewakili.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Musdar, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan haji, termasuk dari sisi fasilitas, transportasi, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua kebutuhan logistik dan koordinasi teknis terus kami persiapkan agar para jamaah bisa berangkat dan pulang dalam keadaan aman, nyaman, dan khusyuk beribadah,” ujar H. Musdar.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menjamin pelayanan optimal kepada jamaah haji asal Sultra.

“Ini adalah amanah besar. Pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah menjadi prioritas utama kita. Karenanya, sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan baik,” kata H. Muhammad Saleh.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan dan manasik haji telah dilakukan sebanyak 10 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan spiritual dan teknis para calon jamaah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan biaya haji tahun ini turut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji.

Tahun ini, sebanyak 2.018 jamaah asal 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar (UPG). Jamaah akan dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni kloter 31, 33, 35, 36, 38, dan 39. Jadwal keberangkatan dimulai pada 22 Mei hingga 28 Mei 2025.

Jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Untuk jamaah dari daerah terpencil atau kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Utara, transportasi laut menggunakan Ferry New Rose akan digunakan untuk menuju Kendari sebelum terbang ke Makassar.

Kemenag Sultra juga mengatur skema pemberangkatan yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk pengaturan bagasi, pemeriksaan kesehatan, hingga validasi dokumen perjalanan.

Seremonial pelepasan jamaah calon haji akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 secara luring di Kendari dan daring untuk kabupaten/kota lainnya. Acara ini diharapkan menjadi simbol penguatan spiritual dan momentum pengantar para jamaah menuju ibadah suci.

“Kita ingin setiap jamaah merasa didampingi sejak dari kampung halaman hingga kembali ke tanah air. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab moral kita bersama,” tutur H. Muhammad Saleh.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke

daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.

Bupati Bombana Hadiri HUT ke-194 Kendari, Tunjukkan Dukungan dan Harmoni Antar Daerah

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mempererat hubungan lintas wilayah dengan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-194 Kota Kendari yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Kendari, Jumat, 9 Mei 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., hadir langsung dalam upacara tersebut. Kehadiran keduanya menjadi simbol kuat dukungan nyata dari Pemkab Bombana terhadap Pemerintah Kota Kendari, sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi antar daerah di Sulawesi Tenggara.

Mengenakan busana adat khas Bombana berwarna hijau, Burhanuddin dan Fatmawati tampil serasi dan mencuri perhatian tamu undangan. Warna hijau yang mereka kenakan melambangkan harmoni, semangat kebersamaan, dan cinta terhadap budaya lokal.

“Kami hadir sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan kepada Kota Kendari yang telah berusia 194 tahun. Kota ini memiliki peran penting dalam perkembangan Sulawesi Tenggara, dan kami dari Bombana ingin terus bersinergi untuk kemajuan bersama,” ujar Burhanuddin usai upacara.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh berbagai tokoh, termasuk para kepala daerah, pimpinan lembaga vertikal, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat dari seluruh penjuru Sulawesi Tenggara. Momen ini bukan hanya

sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi strategis yang memperkuat hubungan antarpemerintah daerah.

Fatmawati Kasim Marewa turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ia menilai acara ini sebagai wujud nyata semangat kebersamaan lintas kabupaten/kota yang semakin kuat.

“Sinergi ini penting agar kita bisa saling belajar, saling mendukung, dan memperkuat peran perempuan serta keluarga dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-194 Kendari mengusung tema “Kendari Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Semakin Maju.” Tema ini menggambarkan semangat kolektif untuk mendorong Kota Kendari menjadi pusat pertumbuhan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat kemajuan Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada daerah yang bisa berjalan sendiri. Kemajuan Kendari juga harus sejalan dengan kemajuan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kehadiran para kepala daerah, termasuk Bupati Bombana, dalam perayaan ini,” ujarnya.

Selain memperingati hari jadi Kota Kendari, kegiatan ini juga menjadi ruang diplomasi kultural dan pembangunan. Kebersamaan para pemimpin daerah yang hadir memberi sinyal positif bagi penguatan agenda bersama dalam membangun Sultra yang inklusif dan maju.

Pemerintah Kabupaten Bombana secara konsisten menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai forum pembangunan regional. Bupati Burhanuddin, yang dikenal visioner dan terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, kerap menekankan pentingnya membangun sinergi antar kabupaten/kota.

“Kita tidak bisa membangun daerah secara eksklusif. Butuh keterbukaan dan kerja sama agar semua daerah di Sultra bisa tumbuh bersama. Kota Kendari adalah mitra penting Bombana dalam menggerakkan roda ekonomi dan sosial,”

tambahnya.

Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, persembahan seni daerah, serta ramah tamah antar kepala daerah dan tokoh masyarakat. Suasana akrab dan hangat membalut seluruh rangkaian kegiatan.

Dengan semangat yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-194 Kota Kendari, diharapkan semangat persatuan dan kerja sama antardaerah di Sultra semakin kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam berbagai agenda pembangunan yang menyentuh kepentingan luas masyarakat Sulawesi Tenggara.

PKK Sultra Gelar TOT Etika dan Kepribadian untuk Kader dan Guru

Kendari, Sultranet.com — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar pelatihan Training of Trainers (TOT) Pengembangan Etika Kepribadian yang diikuti oleh para pengurus PKK provinsi, guru SMA dan SMK se-Sultra, serta pengurus PKK kabupaten dan kota secara daring. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Sultra, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu, 8 Mei 2025.

Pelatihan yang diinisiasi Pokja I TP PKK Provinsi Sultra ini menjadi bagian dari program kerja tahun 2025 yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai etika. Dalam sambutannya, Ny. Arinta menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya strategis dalam memperkuat sumber daya manusia yang berkarakter, percaya diri, dan mampu menjadi teladan di berbagai lingkungan.

“Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk membentuk pribadi yang berempati, sopan santun, dan memiliki etika baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tugas

profesi. Kader dan guru adalah ujung tombak dalam mewujudkan generasi yang beretika dan berkepribadian kuat,” ujar Ny. Arinta.

Ia juga menegaskan bahwa kepribadian yang dibentuk melalui pelatihan ini harus disertai dengan integritas yang tinggi. “Orang yang memiliki integritas, patuh terhadap aturan dan etika organisasi, akan menjadi pribadi profesional yang mampu memberi dampak positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

TOT ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidang etika dan psikologi, yakni Ibu Reny Emilda Susana, S.Sos., MM; Ibu Herniwati Joko, S.E.; serta Ibu Nurhaerani Haeba, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog. Mereka membawakan materi terkait etika di ruang publik, etika berpenampilan, serta pengelolaan emosi dan kesehatan mental dalam berkomunikasi.

Materi-materi tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta sebagai pelatih yang nantinya diharapkan bisa menggandakan pelatihan serupa di lingkungan masing-masing. Tak hanya ditujukan kepada kader PKK, pelatihan ini juga menyasar tenaga pendidik sebagai agen perubahan yang berperan besar dalam pembentukan karakter generasi muda.

Ketua Panitia Penyelenggara, Prof. Dr. Sri Wahyuni, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Pokja I PKK yang berfokus pada pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Ia menambahkan bahwa keterlibatan para guru dan dosen diharapkan mampu memperluas dampak pelatihan.

“Nilai-nilai positif dari pelatihan ini bisa ditransformasikan kepada anak didik di sekolah. Selain itu, kader PKK juga diharapkan dapat mengimplementasikan materi pelatihan hingga ke tingkat kecamatan dan desa,” jelas Prof. Sri Wahyuni.

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi. Acara diawali dengan registrasi dan pembukaan yang diiringi lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, sebelum masuk ke sesi inti pelatihan yang berlangsung sepanjang hari. Para peserta aktif berdiskusi dan menggali materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Mengakhiri sambutannya, Ketua TP PKK Sultra menyampaikan harapannya agar pelatihan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar membekas dalam praktik kehidupan peserta. “Mari kita jadikan pelatihan ini

sebagai momentum untuk memperkuat karakter, memperbaiki etika publik, dan membangun masyarakat yang lebih beradab dan berempati,” tutup Ny. Arinta.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen PKK Sultra dalam memperkuat kapasitas SDM daerah melalui pendekatan pembinaan kepribadian dan etika yang berkelanjutan.